

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koesmargono, RMJ dan Mochammad Dja'is. 2004. *Bahan Kuliah Prof. BPH. Hapsoro Hadiwidjojo, SH. Hukum Acara Perdata : Membaca dan Mengerti HIR*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 1995. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Kamil, Faizal. 2005. *Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Iblam.
- Lembaga Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum USU-Medan. 1996. *Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan (Hasil Seminar)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Perangin, Effendi. 1991. *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*. Jakarta: Rajawali.
- Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supomo, R. 1984. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Wahyu Bumantara, Stefanus. 2006. Skripsi *“Perbandingan Efektivitas Eksekusi Hak Tanggungan antara Pengadilan Negeri dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)”*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.

b. Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Herzein Indonesich Reglement (HIR)

RI, UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

RI, UU Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

RI, UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

RI, UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

RI, UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

RI, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 306/KMK.01/2002 Tentang Balai Lelang.